

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pondok pesantren merupakan institusi pendidikan keislaman yang tetap mempertahankan eksistensinya hingga saat ini. Pada masa lalu, masyarakat mengajarkan pendidikan agama secara sederhana melalui pengajian di rumah-rumah, masjid, langgar, serta tempat-tempat lainnya. Seiring berjalannya waktu, pengelolaan pendidikan agama menjadi lebih baik dan terstruktur dengan munculnya tempat pengajian dan pendirian asrama untuk para santri (Muhaimin, 2020). Asrama ini menjadi ciri khas pondok pesantren yang membedakannya dari lembaga pendidikan lainnya. Pesantren juga berperan penting dalam pengembangan pendidikan. Institusi ini berpotensi menghasilkan perubahan besar dalam pandangan masyarakat tentang relevansi agama dengan pendidikan. Kesadaran masyarakat semakin meningkat bahwa pemahaman agama yang mendalam membutuhkan proses pembelajaran yang intensif melalui pesantren (Hasbullah, 2018).

Pondok pesantren mengupayakan kedisiplinan terhadap santri yang dikemas dalam tata tertib pondok pesantren, meliputi aturan, sanksi, serta pengurus yang menegakkannya. Aturan merupakan seperangkat norma atau pedoman yang dirancang untuk mengatur perilaku para santri dalam lingkungan pondok pesantren. Aturan berfungsi sebagai instrumen yang menciptakan keteraturan dan harmoni dalam kehidupan bersama (Anwar, 2021). Aturan mencerminkan nilai-nilai moral, budaya, atau agama yang dijunjung tinggi oleh pondok pesantren, sehingga menjadi sarana untuk menanamkan dan menjaga identitas bersama. Aturan dapat berbentuk formal, seperti undang-undang dan peraturan tertulis, atau informal, seperti tradisi dan adat istiadat. Keduanya berperan dalam memastikan keadilan dan menegakkan ketertiban dengan memberikan konsekuensi bagi pelanggaran yang dilakukan santri (Zulkifli, 2019).

Aturan memiliki fungsi yang sangat penting dalam membentuk karakter dan moral santri. Aturan di pesantren umumnya mencakup aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari tata cara beribadah, pola hidup, hingga etika berinteraksi dengan sesama. Aturan ini sering kali berbasis nilai-nilai agama Islam dan tradisi pesantren yang mengutamakan kedisiplinan, kesederhanaan, dan ketaatan (Yusuf, 2022). Santri diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pengajian secara teratur, menjaga kebersihan lingkungan, mematuhi jadwal harian, dan menghormati pengurus serta sesama santri. Selain itu, ada juga larangan tertentu, seperti tidak diperbolehkannya membawa alat elektronik tertentu atau keluar lingkungan pesantren tanpa izin. Aturan ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keteraturan, tetapi juga untuk membentuk mental dan spiritual santri agar menjadi individu yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia (Anwar, 2021).

Santri diwajibkan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pondok pesantren. Santri yang tidak mematuhi atau melanggar aturan akan diberikan sanksi. Sanksi merupakan konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada individu atau kelompok yang melanggar aturan yang telah ditetapkan (Rahmawati, 2020). Sanksi bertujuan untuk menegakkan disiplin, memberikan efek jera, dan mencegah pelanggaran di masa depan. Selain itu, sanksi berfungsi sebagai alat untuk memperkuat otoritas aturan serta menjaga keadilan di dalam pondok pesantren. Sanksi dapat berupa fisik, moral, sosial, atau administratif, tergantung pada sifat pelanggaran dan sistem aturan yang berlaku (Nurdin, 2019).

Sanksi diberikan sebagai bentuk pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan kepatuhan pada aturan agama maupun aturan pondok pesantren. Sanksi disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, mulai dari ringan hingga berat. Untuk pelanggaran ringan, seperti terlambat mengikuti kegiatan atau tidak menjaga kebersihan, sanksi yang diberikan berupa teguran lisan, tugas tambahan seperti membersihkan lingkungan, atau kewajiban menghafal doa atau ayat-ayat Al-Qur'an. Sedangkan untuk pelanggaran berat, seperti meninggalkan pesantren tanpa izin

atau melanggar norma agama, sanksi bisa berupa skorsing, pemanggilan orang tua, hingga dikeluarkan dari pesantren (Fauzan, 2021).

Pengurus senior menjadi penegak aturan serta sanksi yang diberikan pada santri yang melanggarnya, sehingga didalam lingkungan pondok pesantren yang memiliki peranan yang sangat penting adalah pengurus senior pondok serta pondok pesantren itu sendiri. Pondok pesantren memiliki peran untuk membentuk dan mengembangkan kualitas para santri, memberikan pendidikan agama yang berkualitas, meningkatkan sumber daya manusia, serta menjaga persatuan umat (Shobri, 2022). Sedangkan pengurus senior merupakan individu atau kelompok yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan sehari-hari di pondok pesantren serta yang menegakkan aturan dan sanksi pada santri yang melanggarnya. Mereka biasanya terdiri dari para ustadz, atau staff administratif yang memiliki peran dalam menjalankan berbagai kegiatan, mulai dari pengajaran agama, pengawasan kegiatan santri, hingga administrasi dan pemeliharaan fasilitas pondok pesantren.

Otoritas pengurus senior terwujud dalam beberapa aspek, dimana pengurus senior memiliki tanggung jawab langsung dalam menegakkan disiplin. Mereka berperan sebagai teladan yang menjalankan peraturan dengan konsisten, sehingga santri baru cenderung mengikuti pola perilaku yang mereka lihat. Hal ini juga menciptakan atmosfer kepatuhan di mana santri baru merasa perlu menghormati dan mengikuti peraturan untuk dapat diterima dalam lingkungan pesantren (Hidayat, 2022). Pengurus senior juga bertindak sebagai pengawas yang memastikan santri mengikuti aturan dengan baik. Mereka memberi bimbingan kepada santri baru untuk memahami alasan dan pentingnya peraturan tersebut, sehingga tercipta kepatuhan yang berbasis kesadaran.

Pengurus senior juga memiliki otoritas untuk memberikan sanksi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap penegakan disiplin. Sanksi yang diberikan sesuai dengan kebijakan pesantren, yang bertujuan untuk mendidik santri agar mematuhi peraturan dengan lebih baik. Pengurus senior juga bertindak sebagai

penghubung antara santri dan pihak pimpinan pesantren dalam hal penyampaian atau perubahan kebijakan. Mereka adalah perpanjangan tangan dari kebijakan pimpinan pesantren yang menyampaikan peraturan dan kebijakan kepada santri, serta memberikan penjelasan agar peraturan dapat dipahami dan diterima (Mulyadi, 2020). Peran otoritas pengurus senior ini menunjukkan adanya hierarki dalam struktur pesantren, di mana posisi senioritas mempengaruhi tingkat pengaruh dalam proses pembelajaran, disiplin, internalisasi nilai-nilai pesantren serta dalam implementasi peraturan yang berlaku di pondok pesantren.

Santri baru menjadi subjek dalam menerapkan aturan dan sanksi yang berlaku. Santri baru di pondok pesantren merupakan individu yang baru memasuki lingkungan dengan tata kehidupan yang sangat berbeda dari kehidupan di luar pesantren (Mulyadi, 2020). Sebagai anggota baru, mereka menjadi subjek utama penerapan aturan dan sanksi yang bertujuan untuk membimbing mereka agar dapat beradaptasi dengan budaya pesantren. Aturan yang diberlakukan kepada santri baru meliputi jadwal kegiatan harian, etika berinteraksi, tata cara beribadah, hingga aturan dalam menjaga kebersihan dan kerapian. Dalam proses penyesuaian ini, santri baru sering menjadi objek pengawasan yang lebih intensif oleh para pengurus senior atau ustaz, mengingat mereka belum sepenuhnya memahami dan terbiasa dengan norma pesantren.

Otoritas yang semena-mena di pondok pesantren sering kali terjadi ketika pengurus senior menyalahgunakan otoritasnya terhadap santri baru. Proses ini bermula dari struktur hierarkis di pesantren, di mana pengurus senior memiliki posisi yang lebih tinggi dan dianggap berwenang mengatur serta mengawasi santri junior. Dalam beberapa kasus, kedudukan ini dimanfaatkan untuk memperlihatkan dominasi atau menegaskan otoritas mereka, sering kali dengan cara yang melampaui batas kewajaran (Priyanto, 2021).

Penyalahgunaan otoritas terjadi melalui pemberian tugas atau hukuman yang tidak proporsional terhadap pelanggaran kecil, penggunaan kata-kata kasar, atau bahkan tindakan intimidasi. Faktor utama yang mendorong

terjadinya relasi kuasa semena-mena ini adalah kurangnya mekanisme pengawasan dari pihak pengelola pesantren terhadap pengurus senior. Selain itu, budaya diam dan penerimaan santri junior terhadap perlakuan tersebut sering kali memperkuat pola penyalahgunaan kuasa ini (Zainuddin, 2022).

Proses ini berlanjut ketika pengurus senior tidak hanya menjadikan aturan sebagai alat pembinaan, tetapi juga sebagai alat untuk memenuhi kepentingan pribadi, seperti meminta santri junior melakukan pekerjaan di luar kewajiban mereka atau memberikan hukuman untuk alasan yang subjektif (Samsuri & Fikri, 2020). Santri baru dapat merasa tertekan, kehilangan rasa percaya diri, atau bahkan mengalami trauma. Jika tidak segera ditangani, penyalahgunaan otoritas ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan merusak nilai-nilai keadilan serta pembinaan di pesantren. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kontrol yang tegas dan dialog terbuka untuk memastikan relasi kuasa yang sehat dan adil (Handayani et al., 2021).

Hegemoni dalam konteks pendidikan pesantren dapat dipahami sebagai hubungan antara pihak yang memiliki otoritas (pengurus senior) dan pihak yang berstatus sebagai penerima otoritas (santri). Dan dalam lingkungan pesantren pengurus senior sangat dihormati oleh santri-santri lainnya terutama santri baru dikarenakan mereka dianggap sebagai guru serta kakak yang dapat membimbing santri lainnya dan tidak sedikit pengurus senior yang memanfaatkan otoritasnya dalam menerapkan peraturan atau memberi hukuman kepada santri yang melanggar dengan sesuka hatinya (Prasetyo, 2019). Pengurus di Pondok Pesantren Hidayatul Ulum memiliki kekuasaan untuk menetapkan peraturan yang harus diikuti oleh santri, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku dan sikap santri dalam berinteraksi dengan lingkungan mereka.

Data dari Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah pesantren di Indonesia terus meningkat, dengan lebih dari 28.000 pesantren yang terdaftar pada tahun 2021 (Kemenag, 2021). Dari jumlah tersebut, banyak pesantren yang menerapkan sistem hierarki yang jelas, di mana pengurus senior memiliki peran dominan dalam pengambilan keputusan.

Hal ini menciptakan dinamika yang kompleks antara pengurus dan santri, di mana santri sering kali harus menyesuaikan diri dengan peraturan yang ditetapkan tanpa memiliki suara dalam proses pembuatannya. Salah satu kasus yang relevan dapat ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nurhadi, 2019), yang menunjukkan bahwa santri di beberapa pesantren mengalami kesulitan dalam mengekspresikan pendapat mereka mengenai peraturan yang ada. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa meskipun santri memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya peraturan, mereka sering kali merasa tertekan untuk mengikuti peraturan tersebut tanpa mempertanyakan atau memberikan masukan. Hal ini menunjukkan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara pengurus senior dan santri.

Peneliti menemukan temuan dalam melakukan pengamatan yang telah dilakukan di Pondok Pesantren Hidayatul Ulum Taman Sari Bangkalan. Pengurus senior bertindak sebagai pengawas utama yang memastikan bahwa santri mematuhi aturan pondok. Mereka memberikan arahan dan mengambil tindakan bila ada pelanggaran, baik dengan teguran verbal maupun sanksi lainnya. Struktur organisasi di pesantren menempatkan pengurus senior pada posisi yang dominan. Hal ini menciptakan hierarki di mana santri baru atau junior cenderung mengikuti dan mematuhi instruksi pengurus senior tanpa banyak pertanyaan. Posisi ini tidak hanya terkait usia, tetapi juga status dan pengalaman mereka dalam sistem pesantren. Pengurus senior tidak hanya berperan dalam penegakan aturan tetapi juga dalam membimbing santri dalam kehidupan sehari-hari di pesantren. Namun, dalam beberapa kasus, santri merasa terkekang karena adanya kontrol yang kuat, meskipun hal ini dilakukan untuk membentuk kedisiplinan.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dominasi serta penyalahgunaan otoritas yang dilakukan oleh pengurus senior terhadap santri sangat penting untuk mengeksplorasi bagaimana relasi kuasa antara pengurus senior dengan santri berpengaruh terhadap implementasi peraturan di Pondok Pesantren Hidayatul Ulum Taman Sari Bangkalan ini terjadi, sehingga peneliti tertarik mengambil judul “Hegemoni Pengurus Senior Terhadap Santri Dalam

Implementasi Peraturan Pesantren (Studi Di Pondok Pesantren Hidayatul Ulum Taman Sari Bangkalan)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana hegemoni yang dilakukan pengurus senior terhadap santri junior dalam implementasi peraturan di Pondok Pesantren Hidayatul Ulum Taman Sari Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hegemoni yang terjadi dan dilakukan oleh pengurus senior terhadap santri junior di Pondok Pesantren Hidayatul Ulum Taman Sari Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

- ## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah kajian literatur dalam bidang sosiologi, khususnya mengenai teori hegemoni Antonio Gramsci diterapkan dalam konteks kehidupan pesantren, terutama dalam hegemoni yang terjadi antara pengurus senior dan santri. Serta dapat memberikan wacana baru tentang bagaimana kekuasaan terbentuk, dipertahankan, atau ditentang dalam pendidikan tradisional seperti pesantren.

- ## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk memperbaiki sistem kepemimpinan di pesantren agar lebih inklusif dan adil, serta mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan, juga dapat memberikan masukan praktis dalam menyusun peraturan yang lebih baik dan cara implementasinya, dengan mempertimbangkan kepentingan santri dan pengurus, serta mengurangi dominasi yang tidak seimbang. Serta dapat memberikan rekomendasi bagi para pengelola pesantren untuk merancang kebijakan yang lebih berorientasi pada keseimbangan kuasa dan harmoni sosial di antara seluruh anggota pesantren.